

Strategi Pengembangan Sektor Kelautan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Tinjauan Literatur Sistematis

Syahrir Akbar¹⁾, Rehan Perdana Putra^{2*)}, Muhammad Vicky Firmansyah³⁾,
M Zakaria Faizal⁴⁾

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan,
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan

*Email: rehan_4121230264@pknstan.ac.id

Received : Mar 29, 2025 / Accepted : Apr 19, 2025 / Published : Mei 30, 2025

Abstract

Indonesia as a maritime country has great potential in the marine sector to improve the welfare of coastal communities, although it has not been optimally utilized. This study aims to formulate a strategy for developing the marine sector through a systematic literature review and SWOT analysis. The formulation of this strategy was developed through the PRISMA method involving a structured approach through a systematic literature review. The results of the study identified key strengths such as abundant marine resources, a large number of fishermen, and a strategic geographical position. Weaknesses include limited capital for business actors, limited marketing access, and minimal infrastructure and facilities. Opportunities include global demand for marine products, blue economy policies, and the development of marine-based MSMEs. The main threats are overexploitation, illegal fishing, and weather and climate fluctuations. However, the potential of the marine sector can be optimized with best practice-based strategies to encourage economic empowerment of coastal communities.

Keywords: Strategy, Development, Marine, Economic Empowerment, Coastal Communities

Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar sektor kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, meski belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan sektor kelautan melalui tinjauan literatur sistematis dan analisis SWOT. Perumusan strategi ini dikembangkan melalui metode PRISMA dengan melibatkan pendekatan terstruktur melalui tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian mengidentifikasi kekuatan utama seperti sumber daya laut melimpah, jumlah nelayan besar, dan posisi geografis strategis. Kelemahan mencakup keterbatasan modal pelaku usaha, akses pemasaran terbatas, serta infrastruktur dan fasilitas minim. Peluang meliputi permintaan global produk kelautan, kebijakan ekonomi biru, dan pengembangan UMKM berbasis hasil laut. Ancaman utama adalah eksplorasi berlebihan, penangkapan ilegal, serta fluktuasi cuaca dan iklim. Meski demikian, potensi sektor kelautan dapat dioptimalkan dengan strategi berbasis praktik terbaik untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Kelautan, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat Pesisir.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menawarkan potensi sumber daya laut yang beragam. Luas lautan yang mencapai 5,8 juta km persegi dan garis pantai yang terbentang sejauh 95.161 km membuat Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, baik dari segi kuantitas ataupun diversitasnya [1]. Besarnya produksi kelautan yang didominasi oleh komoditas perikanan serta rumput laut menjadi faktor niaga yang dinilai mampu menambah devisa negara dan memajukan perekonomian masyarakat [2]. Selain itu, keanekaragaman jenis, bentuk, dan warna ekosistem terumbu karang yang terbentang hingga 2,5 juta hektar di Indonesia serta keindahan pantai dan mangrove, juga turut mengambil bagian dalam memajukan perekonomian negara melalui sektor pariwisata [3]. Eksistensi Indonesia sebagai negara maritim mendorong terciptanya keunggulan kompetitif negara dengan pemanfaatan potensi kelautan sebagai sumber perekonomian kelautan yang komprehensif.

Ragam komoditas yang dihasilkan melalui sektor kelautan menjadi sumber penghidupan yang masif bagi masyarakat pesisir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 3,20 juta nelayan menggantungkan pencaharian pada hasil perikanan tangkap. Selain itu, statistik sumber daya laut dan pesisir juga menunjukkan bahwa terdapat 15,39 persen dari seluruh wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia merupakan desa di wilayah pesisir, dengan komoditas pencaharian berupa perikanan tangkap, budi daya, tambak garam, mangrove, serta wisata bahari dan transportasi umum berbasis perairan [4]. Hal ini mempertegas bahwa besarnya potensi dari berbagai komoditas pada sektor kelautan menjadi tumpuan perekonomian bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Meskipun demikian, kesejahteraan perekonomian masyarakat pesisir belum tergambar dengan baik. Pada tahun 2022, BPS menunjukkan bahwa terdapat 3,9 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir [5]. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ini dinilai sebagai akibat tingginya tingkat ketergantungan masyarakat kepada alam yang fluktuatif serta faktor-faktor seperti penangkapan ikan yang berlebihan, polusi sebagai akibat dari aktivitas pertanian dan industri, serta minimnya infrastruktur dan akses pelaku usaha juga dinilai menjadi alasan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat pesisir [6].

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat atas pengelolaan sumber daya kelautan juga memperburuk tingkat perekonomian wilayah pesisir. Data dari *The State of World Fisheries and Aquaculture* 2022 menunjukkan bahwa faktor-faktor perubahan harga serta fluktuasi kondisi musim dan cuaca belum dapat diatasi oleh masyarakat secara komprehensif [7]. Dengan minimnya pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya alam kelautan, masyarakat pesisir secara ekonomi semakin terpuruk karena distribusi potensi kelautan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, masyarakat pesisir cenderung sulit untuk bangkit dari ketertinggalan dibandingkan masyarakat di kota-kota besar, baik dalam hal sarana, infrastruktur, ataupun kualitas masyarakat.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024, mencanangkan strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang diharapkan mampu mendorong produk perikanan yang kompetitif di pasar global [8]. Meskipun demikian, kebijakan tersebut dari segi implementasi historis menunjukkan tren yang buruk. [9] mengkaji bahwa implementasi program pelatihan teknis bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan terkendala sebagai akibat dari ketidaksesuaian program pelatihan dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti kurikulum yang terlalu umum dan kurangnya partisipasi langsung masyarakat. Sejalan dengan itu, [10] menjelaskan bahwa peningkatan keterampilan tidak didukung infrastruktur logistik dan dukungan pemasaran, yang menghambat akses masyarakat terhadap pasar global.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan merumuskan strategi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga didasarkan atas analisis menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir. Analisis ini digunakan sebagai dasar perumusan strategi yang sesuai dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Integrasi faktor-faktor internal dan eksternal ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemangku kepentingan serta merumuskan sebuah tatanan yang sesuai dan membawa manfaat positif bagi seluruh pihak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis untuk mengidentifikasi secara menyeluruh tantangan dan potensi sektor kelautan guna memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir. Tinjauan literatur sistematis menawarkan pendekatan terstruktur dan ketat untuk mensintesis penelitian yang ada, yang bertujuan untuk menangkap dan menilai secara kritis semua penelitian yang relevan pada topik tertentu [11] Untuk memandu prosesnya, penulis mengadopsi metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA).

Selanjutnya, perumusan pertanyaan penelitian menggunakan konsep P (*Population*), C (*Concept*), dan C (*Context*). Berikut tabel uraian konsep PCC yang digunakan.

Tabel 1. Detail PCC

P (Population)	Masyarakat pesisir
C (Concept)	Implementasi, Pengembangan
C (Context)	Sektor Kelautan, Pemberdayaan Ekonomi

Sumber: Diolah penulis (2025)

Penelitian yang dipilih harus sesuai dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi meliputi sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Inklusi	Eksklusi
Kata kunci “Implementasi” AND “Sektor Kelautan” AND “Pemberdayaan Ekonomi”	Tidak termasuk kata kunci
Kualitatif & Kuantitatif	-
Publikasi antara 2020-2025	Publikasi di bawah 2020
Bahasa Indonesia	-

Sumber: Diolah penulis (2025)

Untuk detailnya, hasil artikel literatur terpilih sebagai berikut:

Tabel 3. Database Penelitian

Database	Year Deleted	Duplicate Removed	Screening	Eligible	Include
Crossref	1000	1000	939	198	71
OpenAlex	19	11	11	6	3
Semantic	207	100	100	33	11
Google Scholar	292	160	153	29	11
TOTAL	1518	1271	1203	266	96
Sumber: Diolah penulis (2025)					

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Bibliografi

Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 16 artikel penelitian. Artikel-artikel yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Artikel Penelitian Terpilih

Penulis dan Tahun	Hasil Penelitian
Atifa Zulfa Khoiriyah (2024)	Penelitian ini menekankan ekonomi biru berkelanjutan sebagai strategi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya laut guna ketahanan pangan, lapangan kerja, dan ekspor, serta menghindari jebakan middle-income trap.
Zulkifli, Irma Nurjannah, Usman, Eliyanti Agus Mokodompit (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perpres No. 16/2017 berdampak signifikan pada ekonomi maritim, termasuk perikanan, pariwisata bahari, akuakultur, konektivitas, investasi, dan peran masyarakat lokal.
Sri Endang Rahayu, Prawidya Hariani RS, Elizar Sinambel (2022)	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Blue Economy memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata berbasis ekosistem mangrove, namun pemanfaatan ekonominya masih belum maksimal, sehingga diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan.
Azzahra Alifa Ramadhani (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang menjadi keunggulan, tetapi keunggulan tersebut harus didukung oleh kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya laut yang sistemik melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Amal Arfan, Muhammad Azrul Muin, Hasriyanti, Muhammad Yusuf, Irvansyah Sukri (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa budidaya di ekosistem mangrove dapat berkelanjutan melalui <i>silvofishery-ecopreneurship</i> , penguatan lembaga, dan pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi tanpa merusak ekologi.
Annita Sari, Dahlan Dahlan, Yudi Prayitno, Ralph A.N. Tuhumury, Willem H. Siegers, Ade Kurniawan, Iwan Ahmad (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata mangrove terpadu memerlukan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui peningkatan SDM, perbaikan fasilitas, dan pengelolaan partisipatif untuk kelestarian ekosistem.
Ira Amanda Hirbasari (2025)	Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi biru dan hijau, didukung transformasi digital, dapat mengoptimalkan sumber daya alam melalui infrastruktur digital, peningkatan kapasitas, dan diversifikasi produk untuk efisiensi serta keberlanjutan perikanan, pertanian, dan ekowisata.

M. Ferdi Septianda (2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam memerlukan integrasi SDGs, Green Economy, Blue Economy, dan Ekonomi Kerakyatan melalui pembangunan berkelanjutan, pemetaan SDA, pemberdayaan, perlindungan lingkungan, dan kolaborasi multipihak untuk kesejahteraan dan keberlanjutan.
Annissa Valentina, Rizqi Apriani Putri, Marliani Marliani (2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa FGD meningkatkan kesadaran pengelolaan SDA berkelanjutan, namun tantangan infrastruktur dan kewirausahaan tetap ada, sehingga dibutuhkan pelatihan, akses modal, dan kolaborasi untuk kemandirian ekonomi pesisir.
Dian Venita Sary, Khairul Rahman, Rendi Prayuda, Rio Sundari (2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah akibat keterbatasan layanan, modal, dan teknologi, sehingga diperlukan pemberdayaan berbasis pendanaan, teknologi, pasar, dan alternatif mata pencaharian untuk kemandirian mereka.
Nirzalin (2020)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sektor kelautan meningkatkan ekspor perikanan, tetapi kesejahteraan nelayan tetap rendah, sehingga diperlukan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas mereka.
Angkasa Putra, Mugi Mulyono (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) dalam akuakultur biru dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan berkelanjutan, sejalan dengan program prioritas pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Supo Dwi Diantara (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan melalui pendekatan yang tepat diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan dalam masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
H. Hendra, Muhammad Nur, Haeril, Junaidin, Sri Wahyuli (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan melalui pengelolaan sumber daya, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata komunitas untuk kesejahteraan.
Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Achmad Zamroni (2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi produksi tuna sirip kuning di Pulau Morotai belum optimal, sehingga diperlukan strategi inklusif melalui pengelolaan terpadu, akses permodalan, dan kemitraan nelayan, koperasi, serta unit pengolahan ikan.
Muhammad Natsir Mallawi, Alfiana Akbar (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan dengan baik dan berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas serta kemandirian mereka melalui akses terhadap teknologi, informasi, modal, dan infrastruktur.

Sumber: Diolah penulis (2025)

Melalui analisis artikel terpilih pada tabel 3, seluruh literatur menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Namun, beberapa literatur juga menyoroti tantangan dan potensi dalam pengembangan sektor kelautan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)

Penelitian ini memberikan pemetaan terkait aspek yang dapat dimanfaatkan serta hambatan yang perlu diatasi guna mendorong penguatan sektor kelautan sebagai pilar ekonomi masyarakat pesisir. Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, yang masing-masing akan dikaji secara mendalam untuk memahami implikasi strategisnya. Berikut analisis internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Tabel 5. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strength*)

1. Perairan Indonesia secara geografis strategis sebagai jalur utama perdagangan maritim dunia, yang berpotensi meningkatkan koneksi dan distribusi hasil laut
2. Adanya upaya kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, dan LSM dalam pemberdayaan masyarakat
3. Sumber daya laut yang melimpah, termasuk potensi perikanan tangkap dan budi daya yang besar.
4. Jumlah nelayan yang besar untuk terlibat dalam kegiatan perekonomian.
5. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Modal yang terbatas bagi pelaku usaha pesisir dan ketergantungan pada bantuan pemerintah.
2. Keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan teknologi yang lebih modern, serta minimnya akses rantai distribusi yang optimal bagi pelaku usaha pesisir.
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi nelayan terkait teknik perikanan berkelanjutan, manajemen bisnis perikanan, serta teknologi dan informasi.
4. Masyarakat pesisir belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan SDA, serta kondisi ekonomi dan politik negara
5. Keterbatasan para nelayan atas akses terhadap pemasaran yang inklusif.

Sumber: [12], [13], [14], [15], [16], [17]

Di sisi lain, berikut faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Tabel 6. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Peningkatan permintaan global terhadap produk kelautan.
2. Diversifikasi ekonomi biru melalui pariwisata bahari dan energi kelautan yang terbarukan.

3. Kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi biru dan industri kelautan membuka peluang bagi inovasi dan investasi.
4. Peluang pengembangan UMKM berbasis hasil laut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Peluang dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan *Blue Sukuk*.

Ancaman (Threats)

1. Illegal fishing dan eksplorasi sumber daya laut yang berlebihan.
2. Perubahan iklim dan bencana alam seperti kenaikan permukaan air laut dan abrasi pantai.
3. Ekspansi nelayan dari daerah lain dengan kapasitas tangkap lebih besar.
4. Pencemaran laut akibat limbah industri dan sampah plastik yang merusak ekosistem serta menurunkan kualitas hasil tangkapan.
5. Persaingan pasar dengan negara lain yang memiliki teknologi perikanan lebih maju dan biaya produksi lebih rendah.

Sumber: [18], [14], [16], [13], [19], [20]

Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan sektor kelautan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan faktor internal, yakni kekuatan yang dapat dimanfaatkan serta kelemahan yang perlu diperbaiki, serta faktor eksternal, yaitu peluang yang dapat dimaksimalkan dan ancaman yang harus diantisipasi.

Tabel 7. Strategi Pengembangan

Strategi S-O

1. Optimalisasi sumber daya laut yang melimpah untuk memenuhi permintaan global dengan penguatan kapasitas produksi dan distribusi.
2. Diversifikasi sektor kelautan berbasis ekonomi biru dengan mengembangkan pariwisata bahari dan energi kelautan memanfaatkan posisi geografis yang strategis.
3. Pemberdayaan UMKM berbasis hasil laut dengan kolaborasi, penyediaan akses moda, dan pelatihan bisnis.
4. Pemanfaatan kebijakan ekonomi biru dengan memastikan keterlibatan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan
5. Mendorong program rehabilitasi ekosistem laut untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan secara berkelanjutan.

Strategi S-T

1. Meningkatkan kolaborasi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat nelayan untuk pengawasan illegal fishing.
2. Mengembangkan inovasi teknologi adaptasi bencana untuk menghadapi kenaikan permukaan laut dan abrasi pantai.
3. Memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah untuk memperkuat hak akses nelayan lokal terhadap wilayah tangkap.
4. Meningkatkan keterlibatan akademisi dan LSM dalam riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk melindungi ekosistem laut.
5. Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan maritim untuk mempercepat distribusi hasil laut dan menekan biaya logistik.

Strategi W-O

1. Akses pendanaan berbasis kinerja dengan dukungan pemerintah melalui surat berharga negara berbasis maritim (*Blue Sukuk*).
 2. Kemitraan strategis dengan industri diperkuat melalui SKPT sebagai perantara distribusi, alih teknologi, dan peningkatan daya saing.
 3. Diversifikasi produk ekonomi sirkular dilakukan dengan mengolah hasil laut dan limbah perikanan menjadi produk bernilai tambah.
 4. Branding produk lokal dengan sertifikasi internasional melalui pengembangan marketing digital.
 5. Kolaborasi multi-pihak diterapkan dalam setiap program berbasis komoditas kelautan untuk efektivitas kebijakan dan inovasi pengelolaan.
-

Strategi W-T

1. Pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi dan informasi melalui penguatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
 2. Platform pemasaran digital inklusif dikembangkan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kelautan
 3. Adaptasi teknologi sederhana diterapkan untuk mitigasi bencana pesisir seperti abrasi dan kenaikan permukaan laut
 4. Penguatan modal dan pelatihan mendasar terkait pengelolaan usaha komoditas kelautan
 5. Kebijakan penguatan infrastruktur sebagai bagian dari perencanaan keuangan pemerintah pusat dan daerah
-

Sumber: Diolah penulis (2025)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan hipotesis bahwa pengembangan sektor kelautan melalui strategi-strategi berbasis analisis internal dan eksternal dengan dasar filtrasi berbagai artikel terkait data menjadi kunci utama pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Strategi yang penulis rancang mempertimbangkan kekuatan seperti sumber daya laut yang divergen, kolaborasi multipihak, dan kondisi Indonesia dalam kacamata geografis, terbukti mampu menjawab tantangan ekonomi di wilayah pesisir dengan tetap mempertimbangkan kelemahan, peluang, serta ancaman menurut analisis terkait. Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan strategi yang efektif melalui sintesis literatur sistematis serta analisis SWOT guna menghasilkan identifikasi faktor kritis dan menjawab urgensi permasalahan ekonomi masyarakat pesisir.

Pengembangan selanjutnya perlu fokus pada implementasi strategi yang telah dirumuskan, terutama melalui uji coba di lokasi spesifik untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi yang dirumuskan. Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis dampak kebijakan yang dihasilkan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan

masyarakat sebagai objek utama implementasi strategi. Selain itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat juga perlu diperkuat melalui program berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem laut sebagai fondasi utama sektor kelautan Indonesia.

REFERENSI

- [1] A. A. Ramadhani, "Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia," *J. Ekon. Sakti*, vol. 12, no. 3, p. 291, 2023, doi: 10.36272/jes.v12i3.296.
- [2] A. Asnawi, E. S. Luhur, and S. H. Suryawati, "Model Permintaan Eksport Udang Olahan Indonesia Oleh Pasar Jepang, Amerika Serikat Dan Uni Eropa Pendekatan Error Correction Model (Ecm)," *J. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 16, no. 2, p. 193, 2021, doi: 10.15578/jsek.v16i2.9768.
- [3] Z. A. Durotunasha, S. Sutanto, F. N. Al Haliim, Y. Izzatunnisa, and N. A. Putri, "Perbandingan Kondisi Terumbu Karang pada Zona Pemanfaatan Wisata Bahari dan Zona Perikanan Tradisional di Pulau Kumbang, Taman Nasional Karimunjawa," *J. Mar. Res.*, vol. 12, no. 3, pp. 501–510, 2023, doi: 10.14710/jmr.v12i3.37077.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024," 2024.
- [5] Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2022-2024. 2023.
- [6] S. Minsas, S. I. Nurdiansyah, S. Helena, and B. Kurniadi, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Pesisir," *Empiricism J.*, vol. 4, no. 2, pp. 407–412, 2023, doi: 10.36312/ej.v4i2.1525.
- [7] D. L. Indraswari, "Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan," *Kompas Indonesia*, p. 2, 2023.
- [8] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Strategi KKP Bikin Produk Perikanan Berdaya Saing Global," 2025.
- [9] S. Siregar, R., & Wahyuni, "Top-Down vs Bottom-Up: Mismatch in Fisheries Training Programs in East Java," *J. Coast. Community Dev.*, vol. 10(2), pp. 45–60, 2023.
- [10] R. Kurniawan, A., & Hidayat, "Beyond Training: The Gap Between Capacity Building and Market Access in Small-Scale Fisheries," *Indones. J. Mar. Policy*, vol. 7(1), pp. 34–50, 2022.
- [11] R. Belahouaoui and E. H. Attak, "Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: improving tax compliance behavior – a systematic literature review using textometry (2016–2023)," *Account. Res. J.*, vol. 37, no. 2, pp. 172–191, May 2024, doi: 10.1108/ARJ-12-2023-0372.
- [12] Muhammad Natsir Mallawi and Alfiana Akbar, "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan," *Monet. J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 1, no. 4, pp. 221–237, Oct. 2023, doi: 10.61132/moneter.v1i4.127.
- [13] R. Triyanti, H. M. Huda, R. A. Wijaya, and A. Zamroni, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Bisnis Inklusif Perikanan Tuna Skala Kecil Di Pulau Morotai," *J.*

- Kebijak. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan., vol. 11, no. 2, p. 155, Dec. 2021, doi: 10.15578/jksekp.v11i2.10225.
- [14] A. Arfan, M. A. Muin, H. Hasriyanti, M. Yusuf, and I. Sukri, "Silvofishery Ecopreneurship - Strategi Untuk Pengembangan Ekosistem Mangrove Sebagai Kawasan Budi Daya Berkelanjutan," J. Kebijak. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan., vol. 13, no. 1, p. 79, Jun. 2023, doi: 10.15578/jksekp.v13i1.12339.
- [15] A. A. Ramadhani, "Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia," J. Ekon. SAKTI, vol. 12, no. 3, p. 291, Dec. 2023, doi: 10.36272/jes.v12i3.296.
- [16] A. Valentina, R. A. Putri, and M. Marliani, "Forum Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Busung Panjang," J. Pengabdi. Negeri, vol. 1, no. 1, pp. 37–47, Dec. 2024, doi: 10.69812/jpn.v1i1.85.
- [17] I. A. Hirbasari, "Transformasi Digital Untuk Optimalisasi Blue Economy dan Green Economy dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Di Kabupaten Brebes," Semin. Nas. Sains dan Teknol. Seri III, vol. 2, no. 1, pp. 1–23, 2025.
- [18] A. Z. Khoiriyah, "Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia," J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt., vol. 8, no. 2, pp. 1331–1356, Jun. 2024, doi: 10.31955/mea.v8i2.4161.
- [19] A. Putra and M. A. B. M. S. I. (INTEGRATED M.-T. A. Mulyono, "Implementasi Akuakultur Biru Melalui Sistem Imta (Integrated Multi-Trophic Aquaculture)," J. Kelaut. dan Perikan. Terap., vol. 1, p. 117, Jan. 2023, doi: 10.15578/jkpt.v1i0.12111.
- [20] H. Hendra, M. Nur, H. Haeril, J. Junaidin, and S. Wahyuli, "Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir," J. Intelekt. Keislaman, Sos. dan Sains, vol. 12, no. 1, pp. 72–80, May 2023, doi: 10.19109/intelektualita.v12i1.16880.
- [21] Zulkifli, I. Nurjannah, Usman, and E. A. Mokodompit, "Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim," Jul. 12, 2023. doi: 10.31219/osf.io/nps2v.
- [22] E. S. Sri Endang Rahayu, Prawidya Hariani RS, "Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Dalam Mencapai Blue Economy," Ekon. J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pembang., vol. 22, no. 1, Jul. 2022, doi: 10.30596/ekonomikawan.v22i1.11041.
- [23] D. V. Sary, R. Prayuda, K. Rahman, and R. Sundari, "Identifikasi Kesejahteraan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti," Sosio Inf., vol. 7, no. 2, Oct. 2021, doi: 10.33007/inf.v7i2.2705.
- [24] M. F. Septianda, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau," J. Archipel., vol. 3, no. 01, pp. 17–27, Jun. 2024, doi: 10.69853/ja.v3i01.88.
- [25] N. Nirzalin, "Economic Empowerment of the Coastal Society: A Case Study of Ujoeng Pacu Village, Muara Satu District, Lhokseumawe - Aceh," J. Sosiol. USK (Media Pemikir. Apl., vol. 13, no. 2, pp. 107–123, Feb. 2020, doi: 10.24815/jsu.v13i2.15953.
- [26] S. D. Diantara, "Partisipasi Masyarakat Maritim Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Pulau Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur," J. Kelaut. dan Perikan. Terap., vol. 1, p. 35, Jan. 2023, doi: 10.15578/jkpt.v1i0.12067.

- [27] A. Sari et al., “Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Terpadu di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa,” *J. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 18, no. 2, p. 211, Dec. 2023, doi: 10.15578/jsekp.v18i2.12103.